ACTON : Jurnal Ilmiah **ISSN Cetak : 0215 - 0832**
Vol .... No ...., Tahun ... **ISSN Online :**

PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERANGKAT DESA (STUDI DI KANTOR DESA MLANDINGAN KULON KECAMATAN MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO)

SITI NURHALIMAH MAULIDATUN NISAK1[1*)], PRODI ADMINISTRASI PUBLIK,FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK, UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
*Email Korespondensi : 29.siti.n@gamil.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kinerja perangkat Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, rendahnya inisiatif kerja, keterbatasan sarana dan prasarana, kekosongan jabatan perangkat desa, serta kendala dalam pelayanan administrasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja perangkat Desa Mlandingan Kulon serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa telah menjalankan perannya sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator, namun belum sepenuhnya optimal. Sebagai motivator, Kepala Desa memberikan arahan, pembinaan, dan dorongan kerja. Sebagai fasilitator, Kepala Desa menyediakan sarana kerja, memanfaatkan teknologi informasi, serta memfasilitasi peningkatan kapasitas melalui pelatihan. Sebagai mobilisator, Kepala Desa menggerakkan perangkat desa, memperkuat koordinasi, dan mendorong partisipasi masyarakat. Faktor pendukungnya meliputi komunikasi yang baik, kerja sama antarperangkat, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi masyarakat. Faktor penghambatnya ialah keterbatasan komputer dan ruang kerja, kekosongan jabatan Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan Rakyat, keterbatasan anggaran pelatihan, serta dokumen administrasi kependudukan warga yang belum lengkap sehingga dapat menghambat kelancaran pelayanan.

Kata kunci: Peran Kepala Desa, Kinerja Perangkat Desa, Motivator, Fasilitator, Mobilisator.

Abstract

This research is motivated by the suboptimal performance of village officials in Mlandingan Kulon Village, Mlandingan District, Situbondo Regency, which is characterized by low work initiative, limited facilities and infrastructure, vacant village official positions, and obstacles in administrative services to the community. This study aims to analyze the role of the Village Head in improving the performance of village officials in Mlandingan Kulon Village and identify the supporting and inhibiting factors in implementing this role. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data analysis uses the Miles, Huberman, and Saldaña model, which includes data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification. Data validity is tested through source, technique, and time triangulation. The results show that the Village Head has performed the roles of motivator, facilitator, and mobilizer, but these roles have not been fully optimal. As a motivator, the Village Head provides guidance, coaching, and work encouragement. As a facilitator, the Village Head provides work facilities, utilizes information technology, and facilitates capacity building through training. As a mobilizer, the Village Head mobilizes village officials, strengthens coordination, and encourages community participation. Supporting factors include good communication, cooperation among village officials, the use of information technology, and community participation. Inhibiting factors include limited computers and workspace, vacant positions of the Head of Government Affairs and the Head of People's Welfare Affairs, limited training budgets, and incomplete population administration documents, which may hinder the smooth delivery of public services.

Keywords: The Role of the Village Head, Performance of Village Officials, Motivator, Facilitator, Mobilizer

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional yang berfungsi sebagai ujung tombak dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Desa memiliki kedudukan strategis sebagai komunitas otonom yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya, serta kebutuhan lokal yang berkembang dalam struktur sosial masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan normatif mengenai fungsi dan kewenangan desa sebagai penyelenggara pelayanan publik, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran strategis sebagai pemimpin, pengarah, pengendali, dan pengoordinasi. Kualitas kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa, efektivitas pelayanan publik, dan mutu tata kelola pemerintahan. Dalam penelitian ini, peran kepala desa dianalisis melalui tiga fungsi, yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Sebagai motivator, kepala desa memberikan dorongan, arahan, pembinaan, serta membangun rasa tanggung jawab perangkat desa. Sebagai fasilitator, kepala desa menyediakan dukungan sarana dan prasarana serta memfasilitasi peningkatan kapasitas perangkat desa. Sebagai mobilisator, kepala desa menggerakkan perangkat desa dan masyarakat agar bekerja sama dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (Hakim dkk., 2018).

Fenomena permasalahan kinerja aparatur pemerintahan desa dapat diamati di Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan Sekretaris Desa, masih terdapat perangkat desa yang menunggu arahan langsung dari Kepala Desa sebelum mengambil langkah dalam melaksanakan tugas. Selain itu, pelayanan administrasi masih menghadapi keterbatasan komputer dan laptop, ruang pelayanan yang terbatas, serta kedisiplinan waktu yang belum sepenuhnya optimal. Struktur perangkat desa juga belum sepenuhnya terisi karena jabatan Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan masih kosong sehingga beberapa tugas harus dirangkap oleh perangkat lain.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan pelaksanaan pemerintahan desa di lapangan. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekosongan jabatan, rendahnya inisiatif kerja, dan koordinasi internal yang belum optimal berpengaruh terhadap pembagian tugas dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran kepala desa dalam meningkatkan kinerja perangkat desa penting dilakukan untuk menggambarkan bagaimana fungsi kepemimpinan tersebut dijalankan dalam kondisi nyata di Desa Mlandingan Kulon.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa memiliki keterkaitan dengan kinerja perangkat desa. Sitopu (2023) menunjukkan bahwa peran kepala desa sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator masih kurang optimal dan kinerja perangkat desa dipengaruhi oleh disiplin, fasilitas, koordinasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan motivasi. Ardiyansyah dan Donny Wijaya (2024) menemukan bahwa kepemimpinan kepala desa belum optimal dalam meningkatkan efektivitas kinerja perangkat desa karena kurangnya partisipasi perangkat desa dalam musyawarah, kesulitan menentukan alternatif kegiatan, dan kurangnya kerja sama. Hapsari, Darma, dan Ariyanto (2023) menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa

belum optimal, terutama dalam pengawasan dan pembinaan disiplin perangkat desa. Sementara itu, Aras Solong dkk. (2023) menemukan bahwa gaya kepemimpinan demokratis dan karismatik dapat membuka ruang partisipasi aparat desa sehingga mendorong motivasi kerja dan kinerja pelayanan. Iskandar dan Irsyad Sudirman (2024) mengungkapkan bahwa efektivitas kinerja perangkat desa masih belum optimal akibat keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur meskipun kepemimpinan kepala desa memiliki peran strategis.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada peran Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja perangkat Desa Mlandingan Kulon serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja perangkat Desa Mlandingan Kulon dan menganalisis faktor pendukung serta faktor penghambatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dan menggambarkan kondisi penelitian dalam bentuk kata-kata serta dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Penelitian dilakukan selama lima bulan, yaitu mulai 05 Desember 2025 sampai dengan 30 Juni 2026.

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi di Kantor Desa Mlandingan Kulon. Data sekunder meliputi profil desa, data demografi penduduk, data jumlah dan komposisi perangkat desa, sarana dan prasarana, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, Peraturan Desa, laporan kegiatan, dokumentasi penyelenggaraan pemerintahan desa, uraian tugas perangkat desa, SOP pelayanan, data kehadiran, notulen rapat, laporan evaluasi kinerja, dokumentasi pembinaan dan pelatihan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa.

Informan ditentukan menggunakan purposive sampling berdasarkan pertimbangan bahwa informan mengetahui fenomena yang diteliti. Informan penelitian terdiri atas Hafid Efendi selaku Kepala Desa sebagai informan utama; Zainal Abidin selaku Sekretaris Desa; Hanafi selaku perangkat desa; Suales selaku Ketua BPD; serta Ustad Misran, Pak Singgih, dan Ustad Hasen selaku tokoh masyarakat sebagai informan pendukung.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara nonpartisipan dengan pendekatan partisipatif pasif untuk mengamati kondisi lingkungan kerja, hubungan kerja kepala desa dengan perangkat desa, sarana dan prasarana, pelayanan masyarakat, serta pelaksanaan peran kepala desa sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam semi-terstruktur. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang bersifat dokumenter.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Mlandingan Kulon telah menjalankan perannya dalam meningkatkan kinerja perangkat desa melalui fungsi sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perangkat desa, meskipun belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelatihan, serta beberapa kendala pelayanan administrasi.

Peran Kepala Desa sebagai Motivator

Sebagai motivator, Kepala Desa berupaya membangun semangat kerja, meningkatkan disiplin, dan mendorong perangkat desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Bentuk motivasi dilakukan melalui arahan rutin, komunikasi terbuka, pelibatan perangkat desa dalam pengambilan keputusan, penanaman nilai pelayanan kepada masyarakat, keteladanan, pemberian apresiasi, serta teguran apabila terdapat pelaksanaan tugas yang belum sesuai.

Komunikasi menjadi salah satu cara utama Kepala Desa dalam membangun motivasi. Kepala Desa memberikan ruang kepada perangkat desa untuk menyampaikan pendapat dan melibatkan mereka dalam keputusan terkait tugas yang akan dilaksanakan. Koordinasi juga dilakukan melalui rapat maupun komunikasi menggunakan WhatsApp sehingga perkembangan pekerjaan dan kendala dapat dikomunikasikan bersama. Pola tersebut menunjukkan adanya hubungan kerja yang harmonis dan mendukung koordinasi.

Kepala Desa juga menanamkan pemahaman bahwa perangkat desa merupakan pelayan masyarakat. Perangkat desa diarahkan untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan maksimal. Selain itu, Kepala Desa mengingatkan perangkat agar bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi, menjaga kedisiplinan, mendokumentasikan kegiatan, serta membuat daftar hadir agar pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan.

Keteladanan juga menjadi bagian dari motivasi. Kepala Desa memandang bahwa pemimpin harus memberikan contoh yang baik karena perilaku pemimpin dapat memengaruhi kinerja perangkat desa. Apresiasi diberikan melalui ucapan terima kasih dan penghargaan terhadap tugas yang diselesaikan dengan baik, sedangkan sanksi diberikan berupa teguran lisan dan, apabila diperlukan, teguran tertulis.

Namun, pelaksanaan fungsi motivator belum sepenuhnya optimal. Salah seorang perangkat desa menyampaikan bahwa kesibukan Kepala Desa dengan berbagai kegiatan dan tamu menyebabkan pembinaan langsung tidak selalu dapat dilakukan. Ketua BPD juga menilai bahwa masih terdapat perangkat desa yang belum sepenuhnya menguasai bidang tugasnya dan bahwa kekosongan Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan memengaruhi pelaksanaan tugas. Karena itu, motivasi perlu didukung dengan peningkatan kapasitas perangkat melalui pelatihan yang berkelanjutan.

Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, Kepala Desa berupaya menyediakan sarana dan prasarana kerja, memanfaatkan teknologi informasi, memberikan kesempatan kepada perangkat desa mengikuti pelatihan, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan tugas. Peran ini diarahkan agar perangkat desa mampu menjalankan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara lebih efektif.

Kepala Desa memfasilitasi peningkatan kapasitas perangkat melalui pelatihan yang berfokus pada penyusunan peraturan desa, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan keuangan desa berbasis sistem. Pemerintah desa juga memanfaatkan

teknologi informasi, salah satunya melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Pemanfaatan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap pengelolaan administrasi yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Kantor Desa Mlandingan Kulon telah memiliki fasilitas dasar berupa ruang pelayanan, jaringan internet, komputer, printer, dan perlengkapan administrasi. Akan tetapi, jumlah komputer masih terbatas sehingga beberapa perangkat harus menggunakannya secara bergantian. Ruang kerja juga masih terbatas. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut diatasi melalui kerja sama antarperangkat desa sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan.

Fasilitasi juga dilakukan melalui penciptaan kerja sama di antara perangkat desa. Kekosongan jabatan Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan menyebabkan beberapa tugas dirangkap oleh perangkat lain. Kepala Desa dan perangkat desa mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui koordinasi dan pembagian tugas yang fleksibel. Selain itu, masyarakat menilai pelayanan pemerintah desa sudah cukup baik, perangkat desa bersikap ramah dan responsif, serta Kepala Desa bersama perangkat desa turun langsung membantu masyarakat ketika terjadi banjir.

Peran fasilitator belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan jumlah komputer, ruang kerja, kekosongan jabatan, serta pelaksanaan pelatihan yang belum dapat dilakukan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan aparatur. Dengan demikian, peningkatan sarana dan prasarana, pemenuhan sumber daya manusia, serta pengembangan kompetensi perangkat desa masih diperlukan.

Peran Kepala Desa sebagai Mobilisator

Sebagai mobilisator, Kepala Desa berupaya menggerakkan perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat melalui koordinasi, musyawarah, pembagian tugas, dan kerja sama. Setiap program pembangunan dan kegiatan pemerintahan diawali dengan koordinasi sehingga permasalahan dapat dibahas dan keputusan diambil melalui kesepakatan bersama.

Di lingkungan pemerintah desa, Kepala Desa membagi tugas sesuai bidang dan tanggung jawab masing-masing perangkat. Apabila terdapat kegiatan yang membutuhkan kerja sama lintas bidang, seluruh perangkat desa dilibatkan. Pembagian tugas yang jelas memberikan kepastian tanggung jawab, sedangkan kerja sama membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan dan menjaga agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.

Peran mobilisator juga terlihat dalam hubungan dengan BPD. Hubungan pemerintah desa dengan BPD berjalan cukup baik melalui komunikasi dan musyawarah dalam penyusunan program pembangunan dan pembahasan persoalan masyarakat. Kepala Desa juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan dalam musyawarah desa. Usulan tersebut ditampung dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan anggaran desa.

Hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi antara Kepala Desa dan perangkat desa berlangsung terbuka dan komunikatif. Hubungan pemerintah desa dengan masyarakat juga terlihat melalui kegiatan gotong royong dan kegiatan sosial. Kepala Desa turut turun langsung dalam kegiatan masyarakat, termasuk ketika terjadi banjir, sehingga memberikan contoh dan meningkatkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi.

Pelaksanaan fungsi mobilisator juga belum sepenuhnya optimal. Partisipasi masyarakat belum merata pada setiap kegiatan, sedangkan kekosongan jabatan

perangkat desa menyebabkan beban kerja aparatur menjadi lebih berat. Meskipun demikian, kendala tersebut dapat diatasi melalui koordinasi, kerja sama, dan semangat gotong royong yang dibangun Kepala Desa bersama perangkat desa dan masyarakat.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung pelaksanaan peran Kepala Desa meliputi komunikasi yang baik antara Kepala Desa dengan perangkat desa, kerja sama yang solid antarperangkat, tersedianya sarana dan prasarana yang secara umum mampu menunjang tugas, pemanfaatan teknologi informasi, serta tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa.

Komunikasi yang terbuka melalui rapat koordinasi maupun komunikasi informal membantu perangkat memahami tugas dan menyampaikan kendala. Kerja sama antarperangkat juga memungkinkan pelayanan tetap berjalan meskipun terdapat kekosongan jabatan. Sarana dasar seperti ruang pelayanan, jaringan internet, komputer, printer, dan perlengkapan administrasi, serta penggunaan SISKEUDES, turut mendukung pekerjaan administrasi. Selain itu, masyarakat cukup aktif mengikuti musyawarah desa, gotong royong, dan program pembangunan. Komitmen Kepala Desa dalam memberikan motivasi, pembinaan, dan kesempatan mengikuti pelatihan juga mendukung peningkatan pengetahuan dan kemampuan perangkat desa.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat meliputi kekosongan jabatan Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan, keterbatasan fasilitas kerja, keterbatasan anggaran pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta permasalahan administrasi kependudukan masyarakat. Kekosongan jabatan menyebabkan sebagian tugas dirangkap oleh perangkat lain sehingga beban kerja tidak merata.

Jumlah komputer yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan menyebabkan penggunaan fasilitas dilakukan secara bergantian, sedangkan ruang kerja yang terbatas memengaruhi kenyamanan dan efektivitas pekerjaan. Pelatihan perangkat desa juga masih bergantung pada program pemerintah kabupaten maupun provinsi karena pemerintah desa belum sepenuhnya mampu menyelenggarakannya secara mandiri. Di sisi pelayanan, masih terdapat masyarakat yang belum melengkapi dokumen administrasi kependudukan sehingga proses pelayanan membutuhkan waktu lebih lama. Hambatan-hambatan tersebut belum menghambat penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan karena pemerintah desa mengatasinya melalui koordinasi, kerja sama, dan optimalisasi sumber daya yang tersedia.

KESIMPULAN

Peran Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja perangkat Desa Mlandingan Kulon telah dilaksanakan melalui peran sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Sebagai motivator, Kepala Desa memberikan arahan, pembinaan, motivasi, evaluasi, membangun kedisiplinan dan semangat kerja melalui komunikasi terbuka serta pendekatan persuasif. Sebagai fasilitator, Kepala Desa berupaya menyediakan sarana dan prasarana, memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi, serta mendorong peningkatan kapasitas perangkat melalui pelatihan dan pembinaan. Sebagai mobilisator, Kepala Desa menggerakkan perangkat desa untuk bekerja sama, meningkatkan koordinasi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa. Secara keseluruhan, ketiga peran tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja perangkat desa, meskipun masih terdapat kendala.

Faktor pendukung meliputi komunikasi yang baik antara Kepala Desa dan perangkat desa, kerja sama yang solid antarperangkat, pemanfaatan teknologi informasi

dalam pelayanan administrasi, tersedianya sarana dan prasarana yang cukup menunjang, serta tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana dan prasarana kerja, kekosongan beberapa jabatan perangkat desa yang menyebabkan beban kerja tidak merata, keterbatasan anggaran pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta permasalahan administrasi kependudukan masyarakat yang memengaruhi kelancaran pelayanan publik.

Saran

Pemerintah desa disarankan terus meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, khususnya untuk mendukung pelayanan administrasi kepada masyarakat. Percepatan pengisian jabatan perangkat desa yang masih kosong juga diperlukan agar pembagian tugas dan tanggung jawab dapat berjalan secara proporsional.

Selain itu, diperlukan dukungan anggaran yang memadai agar program peningkatan kapasitas aparatur desa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan administrasi kependudukan masyarakat sehingga proses pelayanan publik dapat berjalan lebih lancar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo beserta masyarakat Mlandingan Kulon yang telah memberikan informasi serta membantu dalam proses penelitian sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

Sumber Buku

Biddle, B. J. (1986). Recent Developments in Role Theory.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). The New Public Service: Serving, Not Steering.

Dwiyanto, Agus. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.

Henry, Nicholas. (2015). Public Administration and Public Affairs.

Katz, Daniel., & Kahn, Robert L. (1978). The Social Psychology of Organizations.

Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Minogue, Martin. (1998). Changing the State: Concepts and Practice in the Reform of the Public Sector.

Rasyid, Ryaas. (2000). Makna Pemerintahan.

Rivai, Veithzal., & Basri. (2019). Performance Appraisal.

Robbins, Stephen P. (2016). Organizational Behavior.

Soekanto, Soerjono. (2002). Sosiologi Suatu Pengantar.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D

Jurnal

Aras Solong, dkk. (2023). Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Pemerintah Desa di Desa Tenri Pakkua Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.

Ardiyansyah., & Donny Wijaya. (2024). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perangkat Desa di Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa.

Hakim, dkk. (2018). Peran Kepala Desa sebagai Motivator, Fasilitator, dan Mobilisator.

Hapsari, Rindy Putri., Darma, I Gusti Made., & Ariyanto. (2023). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa Nusa Agung Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Iskandar., & Irsyad Sudirman. (2024). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perangkat Desa (Studi di Kantor Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan).

Sitopu, Debby Windasari. (2023). Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa di Desa Kelapa Bajohom Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Mlandingan,_Situbondo

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.